

# Gubernur Sultra Lantik Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah 2025-2030

**Kendari, sultranet.com** - Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Komjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, resmi melantik Dr. Azhari, S.STP, M.Si sebagai Bupati Buton Tengah dan Muh. Adam Basan, S.Sos sebagai Wakil Bupati Buton Tengah periode 2025-2030. Prosesi pelantikan berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra pada Jumat, 21 Maret 2025.

Pelantikan ini merujuk pada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 100.2.1.3-1997 Tahun 2025 yang merupakan perubahan kedua atas Keputusan Mendagri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil Pilkada Serentak 2024.

Dalam acara tersebut, Gubernur Sultra memandu pengucapan sumpah jabatan yang diikuti oleh Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah. Keduanya berjanji untuk menjalankan tugas dengan penuh amanah, berpedoman pada konstitusi, serta mengutamakan kepentingan masyarakat.

“Pelantikan ini bukan sekadar seremonial, tetapi awal dari tanggung jawab besar dalam memimpin daerah. Masyarakat Buton Tengah menaruh harapan besar pada kepemimpinan baru untuk membawa perubahan yang lebih baik,” ujar Andi Sumangerukka dalam sambutannya.

Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat dalam membangun Buton Tengah ke arah yang lebih maju. “Jangan terlalu melihat ke belakang. Mari bersama-sama fokus pada masa depan dan menghadapi tantangan yang ada dengan semangat kebersamaan,” tambahnya.

Sejumlah pejabat turut hadir dalam pelantikan tersebut, termasuk Anggota DPR RI dan DPD RI, Ketua serta anggota DPRD Sultra, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sultra, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sultra, Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra, Ketua KPU dan Bawaslu Sultra, serta tokoh masyarakat, adat, dan pemuda.

Dengan dilantikannya Dr. Azhari dan Muh. Adam Basan, diharapkan kepemimpinan mereka dapat membawa kemajuan bagi Kabupaten Buton Tengah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada pelayanan publik.